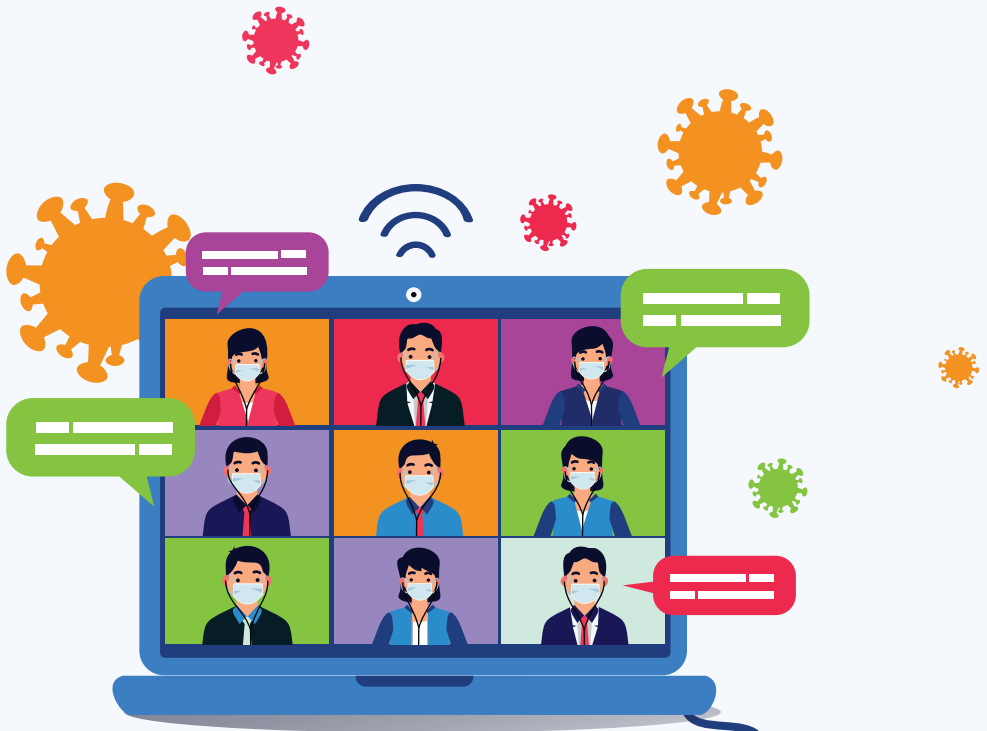


MEDIA, KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI MASA PANDEMI COVID-19



EDITOR :

Didik Haryadi Santoso
Nurudin
Fajar Junaedi

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MEDIA, KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI MASA PANDEMI COVID-19

Penulis :

Soraya Fadhal, St. Tri Guntur Narwaya, Muhamad Sulhan, Agus Triyono, Muchammad Nasucha, M. Ghozali Moenawar, Betty Gama, Erwin Kartinawati, Kheyene Molekandella Boer, Ade Putranto Prasetyo Wijiharto Tunggal, Moh. Zuhdi, Lukman Hakim, Deavvy M.R.Y. Johassan, Narayana Mahendra Prastya, Nadia Wasta Utami, Udi Rusadi, Pipit Fitriyah, Ahmad Fatoni, Inadia Aristyavani, Besti Rohana Simbolon, Ridwan Setiawan Daradjat, Falimu, Rizaldi Parani, Kun Wazis, Pundra Rengga Andhita, Rr. Wuri Arenggoasih dan Ifadatul Khabibah, Sulvinajayanti, Rama Kertamukti, Bono Setyo, Diah Ajeng Purwani, Rocky Prasetyo Jati, Mira Herlina, Yoyoh Hereyah, Indiwani Seto Wahjuwibowo, Loina Lalolo Krina Perangin-angin, Dendy Riksandi, Dasrun Hidayat, Gayes Mahestu, Desliana Dwita, Ansar Suherman, Suyono, Deardra Nurriel, Pulung Setiosuci Perbawani, Fadjarini Sulistyowati, Agus Hermanto, Aminah Swarnawati, Lidya Wati Evelina, Mulharnetti Syas, Lalita Hanief, Ni Made Ras Amanda Gelgel, Zainuddin Muda Z. Monggilo, Sika Nur Indah, Elok Perwirawati, Hadi Purnama, Monika Teguh, Ni Nyoman Ayu Sari Utami Dewi, Erwan Sudiwijaya, Nunik Hariyani, Stefanus Bayu Yubillianto, Indiwani Seto Wahjuwibowo.

Editor :

Didik Haryadi Santoso, Nurudin, Fajar Junaedi



Media, Komunikasi dan Informasi di Masa Pandemi Covid-19

© Penulis

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

628 hal (xii +616 hal), 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama, Agustus 2020

ISBN: 978-623-6615-05-8

Penulis :

Soraya Fadhal, St. Tri Guntur Narwaya, Muhamad Sulhan, Agus Triyono, Muchammad Nasucha, M. Ghozali Moenawar, Betty Gama, Erwin Kartinawati, Kheyene Molekandella Boer, Ade Putranto Prasetyo Wijiharto Tunggal, Moh. Zuhdi, Lukman Hakim, Deavvy M.R.Y. Johassan, Narayana Mahendra Prastya, Nadia Wasta Utami, Udi Rusadi, Pipit Fitriyah, Ahmad Fatoni, Inadia Aristyavani, Besti Rohana Simbolon, Ridwan Setiawan Daradjat, Falimu, Rizaldi Parani, Kun Wazis, Pundra Rengga Andhita, Rr. Wuri Arenggoasih dan Ifadatul Khabibah, Sulvinajayanti, Rama Kertamukti, Bono Setyo, Diah Ajeng Purwani, Rocky Prasetyo Jati, Mira Herlina, Yoyoh Hereyah, Indiwani Seto Wahjuwibowo, Loina Lalolo Krina Perangin-angin, Dendy Riksandi, Dasrun Hidayat, Gayes Mahestu, Desliana Dwita, Ansar Suherman, Suyono, Deardra Nurriel, Pulung Setiosuci Perbawani, Fadjarini Sulistyowati, Agus Hermanto, Aminah Swarnawati, Lidya Wati Evelina, Mulharnetti Syas, Lalita Hanief, Ni Made Ras Amanda Gelgel, Zainuddin Muda Z. Monggilo, Sika Nur Indah, Elok Perwirawati, Hadi Purnama, Monika Teguh, Ni Nyoman Ayu Sari Utami Dewi, Erwan Sudiwijaya, Nunik Hariyani, Stefanus Bayu Yubillianto, Indiwani Seto Wahjuwibowo.

Editor :

Didik Haryadi Santoso, Nurudin, Fajar Junaedi

Perancang Sampul :

Nasrul Nasikh

Tata letak :

Ibnu T.W

Penerbit:

MBridge Press

Supported by:



Organized by:



This page intentionally left blank

KATA PENGANTAR EDITOR

Pandemi Covid-19 telah menunjukkan ketidaksiapan kita dalam menghadapi bencana. Ketidaksiapan ini ditandai dengan ambruknya tata kelola yang digunakan dalam penanganan wabah mematikan ini. Tentu saja, tata kelola yang paling banyak disorot adalah tata kelola kesehatan. Ketika ancaman pandemi membayangi, pejabat pemerintah cenderung menyepelekan dan “denial”. Hal ini bisa dilihat berbagai pernyataan pejabat pemerintah, seperti menteri kesehatan Terawan Agus Putranto dan wakil presiden Ma’ruf Amien.

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menunjukkan daftar para pejabat pemerintah yang mengeluarkan sejumlah blunder pernyataan selama pandemi Covid-19. Lembaga riset ini merilis temuannya pada tanggal 6 April 2020. Rilis dari LP3ES menunjukkan ada tiga uluh tujuh pernyataan pejabat pemerintah yang dinilai blunder. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Terawan yang mengatakan kita “*enjoy*” saja. Menteri kesehatan ini berkata, “Dari 1,4 miliar penduduk sana, yang paling 2.000-an, 2.000 dari 1,4 miliar itu kan kayak apa karena itu pencegahannya jangan panik, jangan resah, *enjoy* aja, makan yang cukup.”

Kedua, penolakan Terawan soal penelitian Universitas Harvard tentang permodelan kemungkinan masuknya Covid-19 ke Indonesia. “Itu namanya menghina wong peralatan kita kemarin di-*fixed*-kan dengan duta besar Amerika Serikat kita menggunakan kit dari Amerika.

Ketiga, pernyataan Ma’ruf Amin yang menyebutkan demikian, “Tiap subuh banyak Kyai dan ulama yang selalu membaca doa qunut, saya juga begitu, baca Qunut, Ya Allah jauhkan lah bala banawa dan wabah wabah penyakit maka Corona nya menyingkir dari Indonesia mudah-mudahan terus dijaga.”

Selain ketiga pernyataan di atas masih ada tiga puluh empat pernyataan lain dari para pejabat. Meremehkan bahaya Covid-19 akhirnya harus dibayar mahal. Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan secara resmi tentang kasus terinfeksi Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Pemerintah mengalihfungsikan Wisma Atlet

Kemayoran di DKI Jakarta. Kebijakan *social distancing* (jaga jarak) di tengah masyarakat juga diberlakukan dengan mengeluarkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kampanye sosial dilakukan oleh pemerintah mengubah perilaku masyarakat agar menaati protokol kesehatan, diantaranya untuk menjaga jarak. Himbauan untuk mengenakan masker juga digencarkan dengan melalui berbagai iklan layanan masyarakat di berbagai media.

Kepanikan terjadi di bulan April sampai dengan Mei. Masyarakat memberlakukan *lock down* lokal dengan menutup akses jalan dan gang di perkampungan dan pedesaan, sebuah kebijakan yang sebenarnya tidak dipilih oleh pemerintah. Pemerintah lebih memilih PSBB daripada *lock down*, namun faktanya masyarakat justru berinisiatif membuat kebijakan ini. Mereka mendapatkan istilah *lock down* dari berbagai media yang memberitakan pandemi.

Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola komunikasi seharusnya menjadi perhatian yang serius. Kebijakan komunikasi yang dilakukan pemerintah seharusnya memperhatikan beragam aspek, terutama berkaitan dengan bagaimana menyampaikan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 kepada masyarakat. Lebih khusus lagi adalah tata kelola dalam menyampaikan informasi tentang protokol kesehatan. Pertimbangan bentuk penyampaian, media untuk menyampaikan informasi, dan pertimbangan perilaku audiens dalam bermedia seharusnya menjadi beberapa hal yang harus diperhatikan.

Di sinilah akademisi Ilmu Komunikasi dituntut kontribusinya. Melalui penerbitan buku ini, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunika (ASPIKOM) berkontribusi dalam gagasan tentang aspek komunikasi dalam penanganan pandemi Covid-19. Berbagai kajian dan gagasan bernas dalam buku ini layak untuk menjadi pertimbangan dalam tata kelola komunikasi di masa depan. Selamat membaca.

Yogyakarta, Agustus 2020

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
Komunikasi Publik di Tengah Krisis: Tinjauan Komunikasi Pemerintah dalam Tanggap Darurat Pandemi Covid-19 <i>Soraya Fadhal</i>	1
Pandemi, Distorsi Komunikasi dan Narasi ‘Hantu Komunis’ <i>St. Tri Guntur Narwaya</i>	26
Pupusnya Nilai Deliberatif dalam Keterbukaan Informasi Publik Penanganan Pandemi Covid-19 <i>Muhamad Sulhan</i>	41
Menakar Keterbukaan Informasi Publik di Tengah Pandemi Covid-19 <i>Agus Triyono</i>	59
Covid-19, Asimetri dan Keterbukaan Informasi Publik <i>Muchammad Nasucha, dan M. Ghozali Moenawar</i>	74
Keterbukaan Informasi Pada Masa Pandemi Covid-19 <i>Betty Gama, Erwin Kartinawati</i>	94
Kematangan Informasi, Mampukah Membantu Menekan Penularan Covid-19? <i>Kheyene Molekandella Boer</i>	102
Konsep Keterbukaan Informasi-Komunikasi: Pendekatan Responsif Bukan Reaktif, Sebuah Orkestrasi <i>Ade Putranto Prasetyo Wijiharto Tunggali</i>	111
Menyoal Narasi Komunikasi Publik Terkait Covid-19 pada Akun Twitter Presiden Joko Widodo dalam Paradigma Naratif Walter Fisher <i>Moh. Zuhdi</i>	119
Korona dan Problem Komunikasi yang Melingkupinya <i>Lukman Hakim</i>	132
Komunikasi di Masa Pandemi (Kajian Teori Paradigma Naratif Walter Fisher) <i>Deavvy M.R.Y. Johassan</i>	144

Analisis Pesan Komunikasi Krisis Kementerian Agama RI di Masa Pandemi Covid-19 (Kasus Pembatalan Pemberangkatan Jamaah Haji Indonesia)	
<i>Narayana Mahendra Prasty, dan Nadia Wasta Utami</i>	154
Bising Politik dalam Komunikasi Mengatasi Pandemi Covid-19	
<i>Udi Rusadi</i>	168
<i>Communication and Network</i> Krisis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia pada Era Transisi Covid-19 di Twitter	
<i>Pipit Fitriyah, dan Ahmad Fatoni</i>	180
<i>Government Communication</i> dan Komunikasi Resiko	
<i>Inadia Aristyavani</i>	196
Komunikasi Krisis Pemerintah Era Pandemi Covid-19 di Media Massa	
<i>Besti Rohana Simbolon</i>	211
Komunikasi <i>New Normal</i> Masa Pandemi Covid-19	
<i>Ridwan Setiawan Daradjat</i>	222
Komunikasi Pemerintah dalam Keputusan <i>Social Distancing</i>	
<i>Falimu</i>	232
Komunikasi Pemerintah, Transparansi, dan <i>Trust</i> sebagai Modal Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19	
<i>Rizaldi Parani</i>	239
Komunikasi Pesantren Melawan Pandemi Covid-19 saat <i>New Normal</i>	
<i>Kun Wazis</i>	253
Penerapan CERC Model dalam Krisis Komunikasi	
<i>Pundra Rengga Andhita</i>	265
Peran Pemerintah sebagai Aktor dalam Jaringan Komunikasi pada Pemberitaan di Masa Pandemi Covid19	
<i>Rr. Wuri Arenggoasih an Ifadatul Khabibah</i>	275
Covid-19 dalam Kacamata Komunikasi Krisis	
<i>Sulvinajayanti</i>	291
Analisa Karakteristik Unggahan Instagram #Untiltomorrow pada Masa Pandemi Covid 19	
<i>Rama Kertamukti, Bono Setyo, Diah Ajeng Purwani</i>	303
Dimensi Media Hiperlokal Infotangerang.co.id pada Pemberitaan Covid-19	
<i>Rocky Prasetyo Jati, dan Mira Herlina</i>	317

Framing Berita Pindahan Ibu Kota Negara di Era Pandemi Covid-19 <i>Yoyoh Hereyah, dan Indiwani Seto Wahjuwibowo</i>	330
Infodemik Covid-19 dalam Ruang Komunitas Virtual <i>Loina Lalolo Krina Perangin-Angin</i>	351
Instagram Media Informasi Publik <i>Workout From Home</i> di Tengah Pandemi Covid-19 <i>Dendy Riksandi, dan Dasrun Hidayat</i>	364
Konsumsi <i>Hoax</i> di Era Pandemi <i>Gayes Mahestu</i>	376
Konsumsi Media Penderita OCD <i>Desliana Dwita</i>	387
Media Sosial dan Pembangunan Komunikasi Krisis-Inklusif <i>Ansar Suherman</i>	395
<i>New Normal</i> dan Irasionalitas Media Sosial <i>Suyono</i>	405
Media Sosial dan Proses Kuantifikasi Diri pada Masa Pandemi Covid-19 <i>Deardra Nurriel, dan Pulung Setiosuci Perbawani</i>	417
Program Acara Belajar dari Rumah: Peran TVRI sebagai Media Publik di Masa Pandemi Covid-19 <i>Fadjarini Sulistyowati</i>	428
Social Distancing dalam Pesan Iklan TV Layanan Masyarakat ANTV <i>Agus Hermanto dan Aminah Swarnawati</i>	440
<i>Virtual Photo Shoot</i> Budaya Populer Di Tengah Pandemic Covid-19 <i>Lidya Wati Evelina</i>	452
Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan tentang Covid-19 <i>Mulharnetti Syas</i>	462
Etika Jurnalistik Pemberitaan Covid-19 pada <i>Citizen Journalism</i> Akun Instagram Wargabanua <i>Lalita Hanief</i>	474
Jurnalis dan Media Lokal Bertahan Hidup dalam Hantaman Covid-19 <i>Ni Made Ras Amanda Gelgel</i>	483

Jurnalis Indonesia di Masa Pandemi Covid-19: Kisah Profesi dan Catatan Harapan <i>Zainuddin Muda Z. Monggilo</i>	497
Menelisik Kerja dan Etika Wartawan di Masa Covid-19 <i>Sika Nur Indah</i>	516
Opini Publik tentang Peran Media Sosial dan Komunikasi Kedermawanan di Era Pandemi Covid-19 <i>Elok Perwirawati</i>	530
Pertarungan Opini di Tengah Infodemik: Strategi Melawan Hoaks Seputar Covid-19 <i>Hadi Purnama</i>	540
Komik Kita Si Binsa Sebagai Alat Komunikasi TNI pada Masa Pandemi Covid-19 <i>Monika Teguh, Ni Nyoman Ayu Sari Utami Dewi</i>	551
Membangun Relasi <i>Brand</i> di Masa Pandemi <i>Erwan Sudiwijaya</i>	564
Pemilihan Media “ <i>Conversation</i> ” Pemasaran Produk Era Pandemi <i>Nunik Hariyani</i>	573
Representasi Citra Garuda Indonesia di Masa Covid-19 (Studi Semiotika Roland Barthes pada Korporat Garuda Indonesia) <i>Stefanus Bayu Yubillianto dan Indiwani Seto Wahjuwibowo</i>	579
BIODATA PENULIS	591

PANDEMI, DISTORSI KOMUNIKASI DAN NARASI ‘HANTU KOMUNIS’

St. Tri Guntur Narwaya

“Awat PKI bangkit kembali”. Frase kalimat ini tiba-tiba kembali mencuat saat masyarakat didera krisis pandemi. Sejak lengsernya Orde Baru (Orba) tahun 1998 hingga hari ini, narasi sentimen ini belumlah meredup sama sekali (Heryanto, 2006; Herlambang, 2013; Budiawan, 2004). Dalam beberapa momen, artikulasinya kembali menguat, dan dalam intensitas tertentu, narasi ‘kebangkitan PKI’ ini masih terus tereproduksi. Bahkan, beberapa organisasi massa dan sebagian kekuatan politik memobilisasi isu ini dengan berbagai motifnya. Mereka seperti ingin meyakinkan publik bahwa kebangkitan PKI adalah sesuatu yang benar-benar serius dan nyata. Isu ini memancing polemik sekaligus kontroversi. Namun tidak sedikit pula yang memahaminya hanya sekedar kabar bohong semata. Bagi sebagian yang tidak percaya, narasi bahaya komunis hanyalah modus politik yang dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu.

Memahami narasi ‘kebangkitan PKI’ di situasi pandemi memunculkan beberapa pertanyaan, terutama menyangkut dimensi-dimensi spesifik apa yang mendorong artikulasi ini kembali muncul? Seberapa jauh relasi dan signifikansinya dengan konteks problem wabah berlangsung? Atau ia hanya bagian siasat wacana untuk orientasi dan target kepentingan politik tertentu? Dibaca sebagai diskursus, polemik ini menarik untuk ditelaah, setidaknya untuk memahami artikulasi wacana yang berkembang di momen krisis ini. Tulisan ini setidaknya hendak menjangkau beberapa persoalan yang penting untuk dielaborasi. *Pertama*, untuk mendalami seberapa jauh narasi ‘kebangkitan PKI’ masih bertahan dan dimobilisasi dalam konteks dinamika politik di era pemerintahan Joko Widodo, dengan melihat berbagai korelasi dan interelasi dengan konfigurasi makna-makna lainnya. *Kedua*, ingin melihat krisis ruang publik komunikasi yang terus mengejala hari ini, terutama problem distorsi wacana akibat berbagai negosiasi politik yang berjalan. Diskursus ‘anti-komunis’ sendiri adalah salah satu ilustrasi menarik untuk bisa menangkap kecenderungan wajah distorsi tersebut.

Untuk menjawab lokus masalah di atas, penulis memposisikan krisis pandemi ini pertama-tama bukan sebagai problem medis semata, namun secara luas bisa ditangkap sebagai lanskap diskursif politik. Pandemi dipahami bukan sebagai realitas fakta empiris-objektif, namun sebagai bagian fenomena diskursif. Melalui kaca mata teoritik pasca-strukturalis seperti Michel Foucault, John B. Tompson, Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, tulisan ini ingin menjangkau dimensi lebih dalam soal artikulasi atas diskursus ‘kebangkitan PKI’ tidak sekedar apa yang diungkapkan secara verbal, namun landasan prinsip politik di dalamnya. Melalui telaah ‘metapolitik’ bisa membantu menelusuri pengandaian-pengandaian dasar mengapa narasi ‘sentimen PKI’ masih terus diawetkan dan bahkan menjadi matriks atau modus eksistensi politik sejak Orde Baru berkuasa.

Pandemi dan Rumor Kebangkitan PKI

Simpang siur informasi cukup meluas terutama di masa-masa awal munculnya wabah, yang berakar dari ketidakpastian atas pengetahuan wabah dan cara mengatasinya. Kecepatan dan daya penularan yang begitu meluas di berbagai wilayah, dengan jumlah angka korban yang terus meningkat mampu memengaruhi efek kepanikan sosial yang besar. Ketidakjelasan sendiri sejak awal didorong banyak pihak, baik dari lembaga institusi kesehatan dunia (WHO) maupun otoritas negara yang masih sering berspekulasi. Dampaknya, terjadi carut marut dalam membangun penyikapan dan tindakan yang dibutuhkan. Tidak sedikit langkah spekulasi ini justru menimbulkan pro-kontra yang kontraproduktif. Bahkan, beberapa langkah yang diambil justru menimbulkan polemik di masyarakat. Langkah-langkah kedaruratan yang dilakukan pemerintah dalam satu sisi dianggap sebagai bentuk kelemahan, kegagalan dan bahkan tidak sedikit yang melihatnya sebagai kesewenangan yang tidak demokratis. Beberapa reaksi politis lalu melihatnya sebagai bukti kegagalan negara. Ia bisa terlihat dari berbagai sikap respon kritik bahkan tidak sedikit bentuk reaksi ketidakpatuhan sosial. Kita bisa lihat fenomena ini dalam soal aturan kebijakan kuncitara (*lockdown*) atau PSBB yang masing-masing pemerintah daerah memberi respon tidak seragam dan tidak keseluruhan mematuhi pedoman kebijakan pemerintah pusat.

Berbagai respon publik muncul dan terutama *santer* disuarakan oleh mereka yang notabene sering dianggap sebagai oposisi politik pemerintahan. Bahkan di beberapa respon tidak sedikit yang membangun tuduhan-tuduhan negatif seperti ketidakbecusan pemerintah, kelambanan gerak antisipasi, konspirasi global hingga rumor negatif kebangkitan PKI. Beberapa nalar yang dibangun terhadap isu kebangkitan PKI setidaknya tertangkap dalam beberapa narasi: *Pertama*, pandemi Covid-19 dianggap sebagai upaya konspirasi komunis Tiongkok untuk menghabisi kelompok Islam. Dalam klaim tuduhan ini, virus dicurigai sebagai ‘senjata biologis’ yang sengaja diproduksi untuk menghancurkan kekuatan politik Indonesia terutama kepentingan Islam (www.cnnindonesia.com, 2020). Tuduhan ini juga diarahkan pada protokol ‘Rapid Test’ yang dianggap sebagai cara China untuk memasukan zat berbahaya ke dalam tubuh. *Kedua*, kebangkitan kekuatan komunis dihubungkan dengan semakin maraknya kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok ke Indonesia (Tirto.id, 2020). Narasi tuduhan ini dikembangkan dengan klaim bahwa kedatangan para pekerja itu sebagai upaya Tiongkok untuk menguasai kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kedatangan TKA ini juga dikawatirkan akan memperluas penyebaran virus Korona. Serangan ke pemerintah pun semakin kencang dengan menganggap persoalan TKA ini bukti pemerintah pro terhadap kepentingan komunis.

Ketiga, narasi yang berupaya mengaitkan kebijakan pembatasan dan penutupan tempat ibadah dalam masa pandemi ini sebagai bagian sistemik untuk merepresi kalangan umat Islam. Kebijakan tersebut dianggap diskriminatif dan kurang adil (Kabar24.Bisnis.com, 2020). *Keempat*, wacana tentang rencana hari ulang tahun PKI, 23 Mei dianggap sebagai bukti atas kebangkitan PKI di Indonesia. Sebelumnya juga telah terjadi penangkapan orang-orang yang memakai atribut kaos berlogo PKI. Sementara itu pada bulan Mei cuitan tentang isu ‘kebangkitan PKI’ semakin menguat (cnnindonesia.com, 2020). *Kelima*, pengangkatan para pejabat publik yang dianggap simpatisan PKI, salah satunya menyorot terpilihnya Imam Brotoseno sebagai Direktur TVRI yang dianggap menjadi unsur-unsur kekuatan PKI di pemerintahan. *Keenam*, adalah polemik pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang ditengarai sebagai agenda untuk mengubah secara sistematis ideologi Pancasila. Tuduhan ini

sangat kuat dialamatkan kepada partai-partai pengusung agenda RUU tersebut, terutama PDIP yang dianggap menjadi kekuatan partai pendukung pemerintah.

Rumor kebangkitan komunis juga dimobilisasi oleh beberapa organisasi massa. Mereka bahkan menggelar aksi penolakan di beberapa tempat. Aksi massa kebanyakan dilakukan oleh kekuatan oposisi politik yang berseberangan dengan pemerintah. Sebagian besar dari mereka adalah sisa-sisa kekuatan 'aksi 212'. Mereka membangun klaim bahwa kebangkitan PKI benar-benar nyata dan bisa dideteksi melalui kebijakan pemerintah yang dianggap semakin memberi angin peluang pada anasir-anasir PKI untuk bergerak. Tuduhan negatif dialamatkan pada Jokowi yang dianggap sebagai anak keturunan PKI. Fitnah tuduhan yang pernah diproduksi oleh Tabloid *Obor* masih direproduksi kembali. Dalam rumor yang lain mereka juga menuding bahwa PDIP dianggap toleran terhadap kepentingan PKI. Dalam aksi massa besar di Jakarta bulan Juni 2020, mereka bahkan berani membakar bendera PDIP (Tirto.id). Selanjutnya oleh PDIP, kasus pembakaran bendera itu disikapi dengan jalur tuntutan, agar para pelaku pembakaran ditangkap dan diproses secara hukum.

Narasi Orde Baru dan Politik Memori

Sejarah menunjukkan, pasca PKI telah dihancurkan, dibubarkan dan dilarang secara resmi di tahun 1966, narasi 'bahaya laten komunis' telah menjelma sebagai 'narasi resmi' yang dipatenkan sepanjang tahunnya. 'Sentimen anti komunias' terus dirawat dan dipahatkan dalam berbagai bentuk monumen, museum, narasi buku sejarah, film hingga bentuk artefak-artefak sosial lainnya. Secara legal, Tap MPRS No. XV Tahun 1996 juga telah membekukan PKI sebagai organisasi politik yang dilarang di Indonesia beserta seluruh nilai ajarannya. Untuk mengenang dan menjadikan politik kontrol ingatan, rezim Orde Baru membangun skema politik 'kewaspadaan nasional' sekaligus memeringati peristiwa 1 Oktober sebagai tonggak penting untuk mencangkokkan kesadaran akan bahaya ideologi komunis di Indonesia. Repetisi kesadaran juga dibangun melalui beberapa sarana media propagandanya seperti kewajiban pemutaran film tentang "Penumpasan Penghianatan G30S/PKI" yang ditayangkan rutin tiap tahunnya. Film yang di sutradarai oleh Arifin C. Noer dan diproduksi

oleh Pusat Produksi Film Negara (PPFN) pada tahun 1984 lalu dihentikan penayangannya di media televisi pada September 1998 atas berbagai kritik dan masukan pertimbangan.

Politik memori Soeharto menempatkan ‘PKI’ tak lebih direpresentasikan sebagai musuh ancaman negara, hantu laknat dan segala citra jahatnya. Pada banyak momen artikulasi, frase ‘komunis’ atau ‘PKI’ bahkan telah terartikulasikan sebagai bentuk makian, umpatan dan persetanan terhadap setiap masalah yang dianggap sebagai sesuatu hal yang kriminal, jahat atau buruk (Budiawan, 2004). Komunis atau PKI terus berkembang ditempatkan secara simbolis dan dikonstruksi secara politis menjadi objek sasaran tuduhan dan mekanisme bekerjanya logika kambing hitam. Setiap krisis atau peristiwa politik yang bermasalah tidak sedikit selalu dialamatkan pada kesalahan PKI. Jikapun praktis sudah dibubarkan dan dihancurkan, PKI masih menjadi lokus bekerjanya politik kambing hitam. Siapapun dan kelompok apapun yang dianggap kritis dan bersebarngan dengan kehendak politik Orde Baru akan mudah dilabeli dan direifikasi dengan stigma politik sebagai komunis atau PKI (Narwaya, 2010). Narasi sentimen “anti komunis” menjadi strategi politik kontrol sekaligus mekanisme untuk mengeksklusi kekuatan-kekuatan yang kritis terhadap rezim Soeharto. Dalam banyak momen kasus, kontrol ingatan ini juga selalu dibarengi dengan ekspresi kebijakan kekerasan politik terhadap setiap orang yang dianggap sebagai lawan politik.

‘Politik ingatan’, selalu dibangun dengan modus kontrol kekuasaan atas narasi sejarah resmi. Sejarah lalu dikreasikan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kekuasaan. Sejarah adalah bangunan pengetahuan yang akan mampu dijadikan sebagai legitimasi kebenaran. Kekuatan yang sanggup mengontrol dan menguasai isi ingatan sejarah, ialah yang akan mampu menguasai opini dan pendapat umum. Michael Sturmer, sosok pengaji politik memori pernah mengatakan bahwa “Di negeri tanpa sejarah, masa depan dikuasai oleh mereka yang menguasai isi ingatan, yang merumuskan konsep dan menafsirkan masa lalu.” Dalam politik ingatan, ada sejarah yang sengaja untuk dihilangkan dan ada sejarah yang ingin dianggap sebagai fakta kebenaran. Memori kolektif masyarakat terpaksa harus ‘mengunyah’ apa yang sudah disediakan oleh narasi resmi. Seperti masa Orde Baru, sejarah lebih banyak ditafsirkan secara seragam oleh kekuatan sejarah militer. Buku karya

Katharine McGregor, “*Ketika Sejarah Berseragam*” memperlihatkan secara terperinci bagaimana historiografi sejarah sejak Orde Baru masih sarat dengan nalar kepentingan kekuasaan, terutama dominasi yang ditafsirkan oleh kepentingan militer (McGregor, 2008).

Politik memori juga selalu bekerja seiring dengan mekanisme politik stigma (stigmatisasi). Politik stigma adalah mekanisme politis untuk memberi identifikasi pada ‘yang lain’, yang cenderung ditempatkan secara tidak baik dan dalam hal politik seringkali dikonstruksikan sebagai musuh. Secara psikologis, stigma bekerja untuk mengkonstruksi sisi negatif. Praktik pelabelan pada ‘PKI’ kepada mereka yang dianggap melawan Orde Baru adalah bentuk untuk mendefinisikan setiap orang secara buruk dan dianggap absah untuk dieksklusi dalam tatanan masyarakat. Pemikir seperti, Erving Goffman, memahami stigma sebagai identifikasi terhadap situasi manusia yang dianggap menyimpang dan berbeda dengan identitas masyarakat (publik). Menurut Goffman (1963: 46), stigma adalah “*differentness about an individual which in given a negative evaluation by others thus distorts and discredits the public identity of the person*”. Dalam pemahaman Goffman, stigmatisasi ini adalah bentuk gambaran tentang sikap, perilaku dan sistem yang tidak memberikan ruang semestinya terhadap identitas perbedaan. Yang berbeda secara politis tidak akan diberi tempat. Dalam tinjauan yang lain, Coleman (1986) memberikan pengertian bahwa stigmatisasi adalah bentuk penghakiman nilai dari kelompok yang dominan, yakni mereka yang memiliki kuasa dalam konteks kultur tertentu terhadap mereka yang tidak diinginkan. Dalam banyak hal, politik stigmatisasi sering dipakai untuk menjaga hirarki sosial, di mana hirarki yang dominan akan menguasai hirarki yang lebih rendah.

Wacana sentimen ‘anti komunis’ bisa dibaca sebagai bentuk artikulasi ideologi yang banyak hal memakai praktik politik diskusif. Fenomena ideologi pada dasarnya tidak jauh dengan fenomena simbolik. Seperti yang diuraikan oleh John B. Thompson (2006), fenomena ideologis mengandung makna pengertiannya sepanjang “diarahkan dalam kondisi sosial-historis tertentu untuk membangun dan mempertahankan relasi dominasi”. Narasi-narasi ideologis ini dalam banyak hal direproduksi dan diartikulasikan melalui berbagai medium dan perangkat pengetahuan. Reproduksi pengetahuan akan

membentuk kesadaran memori serta kepatuhan berpikir. Target utama dalam pembangunan narasi-narasi ideologis adalah tentu kekuasaan atas diri subjek-subjek kesadaran masyarakat. Sebuah pola kekuasaan yang tidak harus berwujud praktik fisik kekerasan, tetapi mampu menjangkau aspek dimensi psikologi sosial.

Menurut Michel Foucault (Basis, 2006), jenis kekuasaan ini tidak harus terartikulasikan dalam tindakan-tindakan represif, namun bisa beroperasi secara sublim dan efektif menginjeksi kesadaran sosial masyarakat di mana ia dibawa melalui mekanisme-mekanisme artikulasi pengetahuan atau modus wacana. Artikulasi wacana tentu saja menemukan makna ideologisnya, ia tidak berada dalam ruang kosong, namun selalu berelasi dengan dimensi-dimensi konteks dan teks yang lain. Sejauh mengikuti pandangan kritis wacana, konstruksi dan artikulasi makna wacana selalu berdimensi relasional. Kehadiran makna wacana selalu dikonstitusikan dengan kehadiran makna yang berbeda (Smith, 2003).

Distorsi Ruang Publik Komunikasi

Artikulasi wacana ideologis selalu bergerak dan beroperasi dalam hubungan hirarki makna yang asimetris. Tidak hanya sebagai tujuan dari cara kerja ideologi, hubungan makna yang asimetris ini justru secara konstitutif menentukan makna dari bangunan ideologi itu sendiri. Hubungan-hubungan ideologis ini bisa dikatakan sebagai hubungan-hubungan sosial yang asimetris. Dalam kerangka ini, penulis meminjam catatan Thompson (2006) untuk membaca narasi ideologis tentang diskursus sentimen ‘anti komunis’, “Sebuah upaya untuk menginvestigasi cara-cara bagaimana makna dikonstruks, diproduksi, dan dimobilisasikan melalui melalui bentuk-bentuk simbol dalam jenisnya yang bervariasi, dari ungkapan bahasa sehari-hari hingga citra dan teks yang kompleks; ia mensyaratkan kita untuk menginvestigasi konteks sosial tempat diterapkan dan disebarkannya bentuk-bentuk simbol, dan ia menuntut kita untuk memperytanyakan apakah, demikian juga bagaimana, makna yang dimobilisir bentuk-bentuk simbol digunakan, dalam konteks tertentu, untuk membangun dan mempertahankan relasi dominasi...”

Makna sebuah wacana tidaklah bisa terbentuk jika tidak dikaitkan dengan berbagai relasi makna yang lain. Prinsip relasional ini juga yang

menjadi prinsip penting untuk membaca bagaimana narasi ‘kebangkitan PKI’ bisa dimengerti dengan lebih jelas. Karena kontijensinya dengan makna lain, maka makna wacana tidak bisa dipahami secara esensial. Makna bahasa (wacana) tidak akan bisa menetap atau *fixed*. Dalam dinamika narasi ‘anti komunis’ kita juga tidak bisa melihatnya sebagai bentuk artikulasi yang bermakna tetap dan sama. Aspek konteks sosial historis membantu menjelaskan wajah transformasi keberadaan makna-makna khusus yang bisa dimunculkan. Berbagai kajian riset memberi penjelasan atas dinamika dan transformasi makna tentang narasi sentimen ‘anti-komunis’. Seperti halnya kajian riset Budiawan yang melihat aspek perubahan tentang wacana anti-komunis pasca Orde baru. Lahirnya berbagai wacana tanding dan juga perubahan struktur sosial politik tertentu memungkinkan hadirnya perubahan-perubahan tersebut. Meski pada satu sisi pengawetan wacana tersebut masih berlangsung, tetapi pemaknaan yang dihadirkan tentu saja tidak sama persis dengan apa yang dahulu tereproduksi oleh Orde Baru (Budiawan, 2004). Karena ciri kontinjensi, perubahan makna tidak dimaknai secara deterministik bahwa makna tentu akan terus berubah. Namun perubahan yang dimaksud di sini menyangkut aspek dinamika kontinuitas (keberlanjutan) dan diskontinuitas (keterputusan) makna yang ada.

Sentimen ‘anti-komunis’ secara ideologis diarahkan untuk meletakkan teks tentang ‘PKI’ atau segala hal yang berelasi dengan narasi ‘komunis’ merupakan sesuatu yang buruk dan harus dilawan. Karena sifat nalar ideologis ini, ia lebih cenderung mengkonstruksi PKI secara apriori dan tidak mendasarkan pada landasan konfirmasi bukti kebenaran. Logika ideologis seringkali menghindari penemuan kesahihan narasi yang dibutuhkan dalam mewujudkan kesahihan kebenaran wacana. Ia lebih menggambarkan usaha membangun ‘legitimasi pembenar’ semata, yang diarahkan sebagai dukungan apriori terhadap wacana yang sudah tersusun sebelumnya. Wacana diyakini secara apriori sebagai yang objektif, tidak terbantahkan dan tentu saja tidak memerlukan uji validasi. Cara kerja stigma dengan demikian sering mengabaikan status kerja-kerja validitas kebenaran tersebut (Haryatmoko, 2010: 3). Karena narasi atas ‘kebangkitan PKI’ sejak awal terlihat tidak dimaksudkan untuk menyediakan ruang konfirmasi untuk validitas kebenaran.

Ruang publik demokratis yang diandaikan berjalan secara

komunikatif tentu sulit bisa dibentuk dalam nalar wacana-wacana ideologis dan stigmatik seperti ini. Komunikasi politik tentu tidak bisa berjalan dalam prosedur yang baik di mana setiap orang bisa secara egaliter menjadi subjek dalam diskursus politik. Meminjam Jürgen Habermas, unsur mendasar tentang ruang publik yang komunikatif adalah syarat adanya penghargaan terhadap dimensi penting ‘rasionalitas kebenaran’. Komunikasi politis bisa berjalan melalui rasionalitas komunikatif yang menghargai aspek validasi dan konfirmasi kebenaran. Jika hal tersebut tidak ada, sejatinya tidak akan pernah ada komunikasi, karena yang ada kemudian hanyalah dominasi atau manipulasi atas kebenaran. Nalar dominasi wacana ini dalam banyak hal telah mendistorsi makna ruang publik komunikatif. Dengan demikian ia sejatinya telah menjadi sumber masalah yang mengancam prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

Sejauh demokrasi diartikan sebagai ruang komunikasi yang emansipatif, maka segala praktik distorsi tentu saja akan merusak proses komunikasi. Ruang publik politis berpotensi akan selalu dirusak oleh nalar distorsif yang ada dalam praktik stigmatisasi dan segala relasi sosial yang dibangun secara dominatif. Dengan demikian legitimasi politik harus berakar pada persetujuan yang dilandaskan pada komunikasi, bukan pada legitimitas semu yang mengacu pada tatanan atau kebenaran yang tidak bisa didiskusikan lagi (Haryatmoko, 2010). Dalam landasan penting ini pula, maka kesetaraan dan kebebasan harus dihargai dan dijamin untuk mencegah campur tangan otoritas, dominasi dan tekanan.

Hantu Komunis sebagai ‘*Constitutive Outside*’

Secara politis, PKI sudah dibubarkan sekaligus dihancurkan, namun mengapa keberadaannya seolah-olah diandaikan masih eksis sepanjang waktu? Secara teoritik, jawaban atas pertanyaan ini tidak akan bisa kita temukan secara mendasar jika kita tidak menyentuh aspek pembentukan makna di dalamnya. Pengandaian mendasarnya pertama-tama terletak pada prinsip logika metapolitik dominan yang membimbing praktik politik itu sendiri. Selama ini, pemahaman gagasan konsep politik selalu diarahkan untuk mencapai cita-cita dasar (*virtue*) keutamaan nilai tertentu. Seburuk apapun jenis dan model politik yang dibangun, konstruksi yang dibangun selalu mengandaikan

adanya *horizon virtue* cita-cita politik keutamaan tersebut. Dasar logika ini sekaligus menjadi modus penting untuk sebuah legitimasi politik. Hal ini bisa kita lihat dalam konsepsi dasar politik demokrasi, yang meletakkan aspek keutamaan tentang kebebasan dan kesetaraan sebagai dimensi terpenting

Persoalan berikutnya adalah bagaimana pengertian demokrasi dengan cita-cita keutamaan selanjutnya bisa terlegitimasi dan diyakini secara umum sebagai sistem nilai yang baik? Untuk kepentingan ini, demokrasi lalu membutuhkan penjelasan atas makna dirinya. Ia sendiri tidak akan menjelaskan apa-apa jika tak merelasikannya dengan makna nilai yang lain. Penjelasan selama ini, Ia selalu diperlawankan secara konstitutif dengan apa yang disebut sebagai musuh-musuh demokrasi. Kita memahami demokrasi lewat relasi makna, yakni sistem-sistem anti demokrasi seperti monarki absolutisme, otoritarisme, fasisme atau kediktatoran lainnya. ‘Yang Politis’ (*The Political*) sebagai cita-cita menemukan kebermaknaan melalui relasinya dengan ‘sistem lain yang diperlawankan itu. Maka makna kebaikan demokrasi tidak hadir dalam dirinya sendiri tetapi selalu secara konstitutif dibentuk oleh kehadiran makna yang lain. Cara nalar demikian sebenarnya terbaca jika kita dekati dengan konsepsi makna yang dibangun oleh perspektif pasca-struktural, bahwa keberadaan makna sesuatu hal akan selalu ditentukan secara konstitutif oleh keberadaan makna hal yang lain secara universal (Suryajaya, 2012). Dengan demikian makna demokrasi selalu secara konstitutif merujuk pada relasi makna dengan sistem totaliter dan segala makna politik yang tidak demoratis. Hal-hal yang tidak dan berlawanan dengan demokrasi menjadi ‘*constitutive outside*’ bagi makna demokrasi itu sendiri.

Kita juga bisa menelusurinya jauh pada perjalanan bagaimana imajinasi politik Indonesia terbangun. Sebelum era kemerdekaan, imajinasi politik Indonesia adalah ‘anti-kolonial’. Imajinasi bangsa kita sejak awal dikonstruksi atas cita-cita untuk melawan sesuatu yang tidak baik yang disebut sebagai kolonialisme. Indonesia yang merdeka sebagai cita-cita politik selalu diperlawanankan dengan segala hal ikhwal yang tidak baik seperti penindasan, kekerasan, pemerasan, pemaksaan yang terangkum dalam watak kolonialisme yang ingin dilawan. Makna Indonesia sendiri kemudian tidak bisa dilepaskan dengan makna kolonialisme. Situasi nalar ini mengalami perubahan

saat Orde Baru berkuasa. Rezim ini dalam konsensus pembentukannya menyertakan secara koinstitutif ‘komunisme’ dan ‘PKI’. PKI secara politis lalu diletakkan tidak hanya sebagai musuh yang harus dilawan, namun makna atasnya telah memberi eksistensi makna terhadap keberadaan Orde Baru itu sendiri. Di mana orde Baru bisa dikatakan berdiri tegak dengan pilar makna di luarnya, yakni sebuah rezim yang mendaku sebagai anti komunis.

Prinsip dasar inilah yang kemudian menentukan segala hal sikap maupun tindakan politik Orde Baru. Tanpa mengkonstruksi ‘hantu komunis’ sebagai ihwal ‘*contitative outside*’ bisa dikatakan Orde Baru tidak akan ada. Karena menjadi jaminan atas identitas dan eksistensi politik, maka keberadaan ‘hantu komunis’ pada satu sisi ingin dilawan dan dihilangkan, namun di sisi lain ia akan selalu dihidupkan. Karena peran konstitutifnya ini, ‘PKI’ apakah secara realitas ada atau tidak ada tidak menjadi penting. Apa yang penting adalah mempertahankan relasi biner diskursif ini agar terus awet dan bertahan.

Kita bisa melihat relasinya dengan fenomena pasca-Orde Baru, kekuatan-kekuatan politik yang dahulu menopang eksistensi wacana ini pada kenyataannya terus berusaha untuk mempertahankannya. Kita bisa ilustrasikan ini dalam modus pembentukan makna yang berlaku universal. Apa yang baik, akan bisa dimaknai baik bukan karena makna baik itu sendiri, tetapi karena ada makna tidak baik di luar sana yang bisa menjadikan makna baik tersebut menjadi bermakna. Modus oposisi biner inilah yang masih berlaku untuk membaca narasi pengawetan sentimen anti komunis, yang pada momentum tertentu terus direproduksi.

Representasi atas makna buruk komunis tidak akan pernah bisa merujuk pada proses penandaan yang objektif. Representasinya bisa terus bergerak sesuka hati sesuai dengan konteks kepentingan apa yang ingin dibangun. Makna tentang ‘PKI’ atau “komunis” tidak merujuk pada entitas esensial atau sesuatu ihwal yang objektif dan empiris. Apa yang dikonstruksikan menjadi sifat buruk bisa dibentuk dalam kreasi tanpa batas seperti modus *simulacrum* tanda yang terus berkembang. Namunpun demikian, kebertahanan makna selalu juga ditentukan sejauh mana konfigurasi makna yang terjadi. Konfigurasi makna ini bisa berubah ditentukan oleh bagaimana masing-masing unsur makna saling bernegosiasi dan juga berkontestasi.

Secara diskursif, narasi tuduhan ‘kebangkitan PKI’ yang direproduksi oleh beberapa kekuatan masyarakat juga menemukan titik ekuivalensi dan juga titik diferensiasinya. Dominasi narasi anti komunis pada dasarnya berhadapan dengan berbagai unsur yang juga menantanginya (rival tanding), dari kehadiran wacana-wacana yang lain. Kekuatan Orde Baru secara politis terfragmentasi dan tidak terpusat pada satu kubu kekuatan semata. Kontestasi menjadi lebih terbuka dan memungkinkan ekspresi pemaknaan atas sejarah dan narasi tentang PKI bisa tidak lagi seragam.

Ekspresi yang beragam ini juga ditunjang oleh semakin terbukanya ruang publik melalui berbagai keterbukaan teknologi media. Setiap narasi politik lalu mudah untuk dicek dan diverifikasi apakah sebagai kebenaran atau hanya sebagai manipulasi semata. Kasus terakhir tentang polemik pembakaran bendera PDIP yang dianggap sebagai partai yang dekat dengan PKI mudah untuk dipatahkan kesahihan argumentasinya. Memang modus politik stigma dan fitnah tuduhan, secara cepat dan masif bisa mudah termobilisasi karena peran mediasi media, namun di sisi lain ia juga mudah untuk diverifikasi kebenarannya melalui teknologi media. Modus stigmatisasi dan kampanye kebencian melalui narasi anti-komunis yang menysar pada kelompok-kelompok tertentu ini, tidak akan cukup mudah mendominasi keseragaman makna.

Apa yang menarik untuk jadi catatan refleksi atas fenomena ini adalah: *Pertama*, narasi sentiment ‘anti komunis’ sendiri telah mengalami transformasi tidak hanya pada bentuk artikulasinya, namun juga dalam kualitas maknanya yang tidak lagi seperti era represi Orde Baru sebelumnya. Aspek keterbukaan media, memungkinkan membantu setiap orang untuk menganalisis, mengoreksi, memverifikasi dan mengkonfirmasi kesahihan dan kevalidan narasi ini. Pemaknaan tidak lagi bisa menjadi hegemoni sepenuhnya, karena kontestasi diskursus lebih bisa terbuka dan beragam. *Kedua*, dalam prinsip ruang publik demokratis, narasi sentimen kebencian yang tidak terlandasi dengan spirit validitas kebenaran dan korespondensi atas realitas fakta kebenaran hanya akan memperkeruh dan mendistorsi ruang publik demokrasi. Nalar stigmatisasi dan kebencian politik yang tidak menempatkan ruang kontestasi yang egaliter dan demokratis ini tidak hanya akan membuka distorsi, namun juga potensi kekerasan sosial dan politik secara lebih luas. *Ketiga*, praktik narasi kebencian dan pola-

pola komunikasi politik yang dominatif biasanya justru hanya menjadi tempat berlindung atas selubung nalar yang bekerja di baliknya. Diseminasi pengetahuan dan literasi politik masyarakat yang semakin baik, justru akan menjadi pagar kontrol atas kerja nalar dominatif ini. Setiap individu kini bukan semata sebagai objek sasaran politik, namun juga bisa menjadi subjek aktif untuk bisa terlibat dalam ruang-ruang diskursus politik. Dalam perkembangan inilah, dominasi wacana selalu akan menemukan potensi-potensi resistensi dan keretakannya. Narasi kebenaran sejarah dan makna-makna politik kini tidak lagi bisa mudah untuk dibekukan secara seragam dalam kotak kepentingan yang tunggal.

Daftar Pustaka

- Bisnis.com. (2020). "MUI Kritik Pemerintah Soal Penutupan Masjid". Sumber: <https://m-bisnis.com.cdn.ampproject.org/v/s/m.bisnis.com/amp/read/20300517/15/1241676/mui-kritik-pemerintah-soal-penutupan--masjid> . Diakses tanggal 29 Juni 2020.
- Budiawan. (2004). *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Reskonsiliasi Pasca-Soeharto*. Jakarta: Penerbit Elsam.
- CNN Indonesia. (2020). "Belum September, Isu Bahaya PKI Ramai di Medsos Sejak Mei". Sumber: <https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20200526073035-192-506863/belum-september-isu-bahaya-pki-ramai-di-medsos> . Diakses tanggal 29 Juni 2020.
- CNN Indonesia. (2020). "Muhammadiyah Sesalkan Isu Corona Konspirasi Yahudi dan China". Sumber: <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200427162024-20-497724/muhammadiyah-sesalkan-isu-corona-konspirasi-yahudi-dan-china>. Diakses tanggal 28 Juni 2020.
- Coleman, LM. (1986). *Stigma: An Enigma Demystified*. S.D. Ainsley, O. Beckett & LM Coleman (eds). *The Dilemma of Difference* (pp. 211-232). New York: Plenum Press.
- Goffman, E. (1963). *Stigma Notes on The Management of Spoiled identity*. New York: Shusters, Inc.
- Haryatmoko. (2010). *Dominasi Penuh Muslihat: Akar-akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Herlambang, W. (2013). *Kekerasan Budaya Pasca 1965; Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film*. Jakarta: Penerbit Marjin Kiri.
- Heryanto, A. (2006). *State Terrorism and Political Identity in Indonesia, Fatally Belonging*. New York: Routledge.
- Majalah Basis. (2006). *Edisi Khusus Michel Foucault*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- McGregor, K. (2008). *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Syarikat,

- Narway, STG. (2010). *Kuasa Stigma dan Represi Ingatan*. Yogyakarta. Penerbit Resist Book.
- Smith, AM. (2003). *Laclau and Mouffe, The Radical Democratic Imaginary*. London: Routledge.
- Suara.com. (2020). “TKA China Masuk Sultra, Wabah Covid-19 Kian Menkhawatirkan”. Sumber: <https://micrpsite-suara.com/dpr/2020/05/01/082528/tka-china-masuk-sultra-wabah-covid-19-kian-mengkhawatirkan>. Diakses tanggal 28 Juni 2020.
- Suryajaya, M. (2012). *Kajian tentang Marxisme dan Filsafat Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Resist Book.
- Thompson, JB. (2006). *Kritik Ideologi Global* (penerjemah: Haqqul Yaqin). Yogyakarta: Penerbit Ircisod.
- Tirto.id. (2020). “Bendera PKI & PDIP Dibakar di Demo PA 212 soal HIP Berimbas Panjang”, Diakses dari <https://amp=tirto=id.cdn.ampptobject.org/v/s/amp.tirto.id/bendera-pki-7-pdip-dibakar-di-demo-pa-212-soal-hip-berimbas-panjang>. Diakses tanggal 29 Juni 2020.